

## BAB II

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah Urusan Wajib Bukan Pelayanan sebagai di maksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi urusan

1.1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan adalah program kerja urusan wajib yaitu urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai , yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
I.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.644.543.500,-
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.500.000,-

	3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	297.856.000,-
	4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.113.000,-
	5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,-
	6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.000.000,-
	7.	Penyediaan alat tulis kantor	24.800.000,-
	8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.500.000,-
	9.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8.000.000,-
	10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	47.732.000,-
	11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.442.500,-
	12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,-
	13.	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,-
	14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	385.000.000,-
	15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.000.000,-
	16.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	386.400.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		157.000.000,-
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,-
	2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	107.000.000,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		67.300.000,-
	1.	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000,-
	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	47.300.000,-

		<b>dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</b>	
<b>4.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>		<b>4.677.942.000,-</b>
	1.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	245.000.000,-
	2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik 2019)	979.252.000,-
	3.	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik – 2019)	3.098.690.000,-
	4.	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	180.000.000,-
	5.	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr.Praktek & Bidan Praktek	175.000.000,-
<b>5.</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>		<b>233.956.000,-</b>
	1.	Pembinaan PIK Remaja/Mahasiswa di Kabupaten Berau	233.956.000,-
<b>6.</b>	<b>Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera</b>		<b>317.233.000,-</b>
	1.	Pembinaan & Evaluasi Kelompok UPPKS	235.123.000,-
	2.	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB-BKR dan BKL	82.110.000,-
<b>II.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
<b>1.</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>1.835.555.000,-</b>
	1.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	775.770.000,-
	2.	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	100.000.000,-
	3.	Kabupaten Layak Anak	400.000.000,-
	4.	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	282.784.000,-
	5.	Pemenuhan Hak Anak	277.001.000,-
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		<b>566.502.000,-</b>

1.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	416.200.000,-
2.	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan Dalam Pembangunan	100.302.000,-
3.	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	50.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>9.500.031.500,-</b>

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset DPPKBP3A Kab. Berau

### C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 41 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari SLTA sebanyak 12 Orang, DIPLOMA II/III (D-2 / D-3) sebanyak 3 orang, STRATA 1 sebanyak 20 orang, STRATA 2 sebanyak 5 orang, STRATA 3 sebanyak 1 orang seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPPKBP3A Kabupaten Berau**  
**Tahun 2019**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SLTP	-
2	SLTA	12
3	DIPLOMA II/III (D-2 / D-3)	3
4	STRATA 1	20
5	STRATA 2	5
6	STRATA 3	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Berau

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Namun masih perlunya tenaga staf administrasi umum dan staf Khusus untuk bidang pelayanan KB dan Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang belum memiliki petugas yang berlatar belakang teknis, dengan demikian perlu di tambahnya ASN yang berlatar belakang administrasi umum dan teknis terkait layanan pelayanan KB dan Penanganan Kekerasan pada perempuan dan anak disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun fungsional.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pangkat dan Golongan Pegawai DPPKBP3A**  
**Kabupaten Berau**  
**Tahun 2018**

NO	Pangkat / Golongan	JUMLAH
1	Juru Muda/IA	-
2	Juru Muda TK. I/IB	-
3	Juru/IC	-
4	Juru TK. I/ID	-
5	Pengatur Muda/IIA	-
6	Pengatur Muda TK. I/IIB	1
7	Pengatur/IIC	-
8	Pengatur TK. I/IID	6
9	Penata Muda/IIIA	3
10	Penata Muda TK. I/IIIB	3
11	Penata /IIIC	3
12	Penata TK. I/IIID	20
13	Pembina /IVA	4
14	Pembina TK I/IVB	1
15	Pembina Utama Muda/IVC	-
16	Pembina Utama Madya/IVD	-
17	Pembina Utama/IVE	-

	<b>JUMLAH</b>	<b>41</b>
--	---------------	-----------

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Berau

Sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, tercatat 70,69% pegawai DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah golongan III, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 1 dan SLTA. Pegawai yang berpendidikan Strata 1 pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan pada DPPKBP3A Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional DPPKBP3A**  
**Kabupaten Berau**  
**Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	<b>Pejabat Struktural</b>	25
2	<b>Pejabat Fungsional</b>	16
	<b>JUMLAH</b>	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Berau

#### **D. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dinas DPPKBP3A Kabupaten Berau Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.500.031.500,- yang terbagi dalam 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dengan presentasi sebesar 96.22% pada skala kategori penilaian **Baik** sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 7.567.427.590,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.500.031.500,-. Dengan capaian presentasi sebesar 79.66 % Pencapaian realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sedang**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

## 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PelaksanaanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.644.543.500,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.600.881.781,- dengan persentase 97,35%, adapun realisasi fisik kegiatan dengan presentase 99,83 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 2.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,-	3.200.000,-	100	600 Lembar	600 Lembar	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.500.000,-	85.193.800,-	91,12	12 Bulan	12 Bulan	100
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	297.856.000,-	289.286.000,-	97,12	Motor 32 Unit, Mobil 4 Unit	Motor 32 Unit, Mobil 4 Unit 396 UB	100
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.113.000,-	111.180.000,-	94,13	80 OB	80 OB	100
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,-	11.992.500,-	99,94	100Buah	Buah	100
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.000.000,-	33.000.000,-	100	35 Unit	35 Unit	100
7.	Penyediaan alat tulis kantor	24.800.000,-	24.799.000,-	100	50 Jenis	50 Jenis	100
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.500.000,-	35.472.000,-	99,92	30.000 Lembar	30.000 Lembar	100
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,-	7.972.000,-	99,65	70 Buah	70 Buah	100

10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.732.000,-	46.540.000,-	97,50	7 Unit	7Unit	100
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.442.500,-	10.412.500,-	99,71	25 Jenis	25 Jenis	100
12.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,-	6.480.000,-	72	1.080 Eksemplar	1.080 Eksemplar	100
13.	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,-	99.990.000,-	99,99	20 Kali Rapat	20 Kali Rapat	100
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	385.000.000,-	384.908.141,-	99,98	35 Kali	35 Kali	100
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.000.000,-	80.000.000,-	100	100 Kali	100 Kali	100
16.	Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran	386.400.000,-	370.455.840,-	95,87	144 OB	144 OB	97,22
	Total .....	1.644.543.500,-	1.600.881.781,-	97,35			99,83

- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas
- Sasaran Strategis : Tersedianya data pegawai dan data aset.
- Indikator Program/Keluaran : Pelayanan Administrasi perkantoran yang terselesaikan
- Indikator Kegiatan/Hasil : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Manfaat : Pelaksanaan Administrasi perkantoran berjalan dengan baik
- Dampak : Meningkatnya kualitas layanan internal Dinas.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan prasana perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.157.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 142.325.000,- dengan persentase 90,65% dapat dilihat realisasi pada tabel 2.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	50.000.000,-	35.405.000,-	70,81	2 Unit	2 Unit	100
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	107.000.000,-	106.920.000,-	99,93	2 Unit	2 Unit	100



- Tujuan Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Dinas dan Kualitas dan pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor
- Sasaran Strategis : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.
- Indikator Program/Keluaran : Tersediannya Fasilitas Kantor yang di butuhkan
- Indikator Kegiatan/Hasil : 2 Unit Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Kantor
- Manfaat : Terpenuhinya Sarana dan prasarana Kendaraan Operasional dan Pemeliharaan gedung kantor.
- Dampak : Tersedianya 2 Kendaraan Operasional dan 2 Unit Pemeliharaan Gedung dan Kantor

### 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 67.300.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 62.593.450,- dengan persentase 93,01 serapan tahun 2019 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		Capaian
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000,-	20.000.000,-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47.300.000,-	42.593.450,-	90.05	9 Dokumen	9 Dokumen	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Program dan Kegiatan Kantor di Masyarakat dan Meningkatnya kualitas Penyusunan, Perencanaan, Program, kegiatan, Pelaporan dan Monitoring</li> <li>- Sasaran Strategis : Terexposenya Program dan Kegiatan Kantor dan Tersedianya Dokumen Perencanaan , Program, Pelaporan dan Monitoring yang berkualitas.</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya Pameran Pembangunan dan Tersusunya dokumen perencanaan Renstra, RKA, DPA, Lakip, SOP, IKM, LPPD, LKPJ, Perjanjian Kerja</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : 1 Kegiatan dan Laporan 9 Dokumen</li> <li>- Manfaat : Terexposenya Program dan Kegiatan Kantor dan Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Program, pelaporan dan Evaluasi.</li> <li>- Dampak : Masyarakat dan Berbagai Pihak dapat Mengetahui Berbagai Program dan Kegiatan Kantor serta Tersedianya Laporan dan Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>							

### 4. Program Keluarga Berencana

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dianggarkan sebesar Rp. 245.000.000,-

dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 244.938.426,- dengan persentase 99,97% .yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	245.000.000,-	244.938.426,-	99,97	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Keluarga Akseptor</li> <li>- Sasaran Strategis : Masyarakat</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Prosentasi Pemakaian Kontrasepsi KB</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Terlayannya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB</li> <li>- Manfaat : Meningkatnya Kualitas Keluarga Akseptor</li> <li>- Dampak : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</li> </ul>							

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Saprasi Penyuluh KB ( DAK – Fisik 2019 )dianggarkan sebesar Rp. 979.252.000,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 922.789.100,-dengan persentase 94,23%yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel2.9 sebagai berikut

**Tabel 2.9**  
**Kegiatan Penyediaan Saprasi PKB (DAK Fisik 2018)**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana ( DAK –Fisik 2018)	979.252.000,-	922.789.100,-	94.23	1 Unit	1 Unit	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Advokasi dan KIE KB ke seluruh wilayah Kabupaten Berau</li> <li>- Sasaran Strategis : Pelayanan KB</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Tersedianya Saprasi Penyuluh KB</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Peningkatan Pelayanan KB</li> <li>- Manfaat : Tersosialisasinya Program KB</li> <li>- Dampak : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang KB</li> </ul>							

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional KB ( DAK – Non Fisik 2019 ) dianggarkan sebesar Rp. 3.098.690.000,-dengan capaian realisasi

keuangan sebesar Rp. 1.535.351.388,-dengan persentase49.55%. dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.10 sebagai berikut

**Tabel 2.10**  
**Kegiatan Bantuan Operasional (DAK - Non Fisik2019)**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Bantuan Operasional KB ( DAK NON FISIK 2017)	3.098.351.000,-	1.535.351.388,-	49,55	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui Program KKBPK serta membangun sector terkait dalam rangka meningkatkan keluarga kecil berkualitas</li> <li>- Sasaran Strategis : Masyarakat, PKB dan 13 Kecamatan</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Terlayannya Masyarakat dalam hal ber KB</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Peningkatan Jangkauan Pelayanan KB</li> <li>- Manfaat : Meratanya Akses dan Informasi Pelayanan KB</li> <li>- Dampak : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</li> <li>- Permasalahan Yang di hadapi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terserapnya dana operasional Balai Penyuluh KB yang di anggarkan untuk 7 Balai di karenakan balai yang yang dibangun tahun 2019 baru 1 ( dua ) unit</li> <li>2. Tidak tersedianya dana Pendamping DAK – BOKB dari APBD sehingga tidak tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung biaya operasional penyuluhan KB di Kampung KB</li> <li>3. Pokja Kampung Kb tidak dapat melaksanakan kegiatan kampung KB di karenakan minimnya pengetahuan dari SDM Pokja di Kampung KB.</li> <li>4. Banyaknya kegiatan di Kampung kampung terpencil dan pulau pulau terluar yang sulit terjangkau sehingga dana kegiatan pertemuan di kampung – kampung tersebut tidak dapat di gunakan.</li> <li>5. PKB yang ada kurang pro aktif dalam melaksanakan program kerja KKBPK</li> <li>6. Masih terbatasnya petugas PKB di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah kampung dan sangat luasnya antara kampung yang di layani.</li> </ol> </li> </ul>							

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 167.490.001,- dengan persentase 93.05%. Dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.11 sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Kegiatan Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	180.000.000,-	167,490.001,-	93,05	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Kegiatan DAK BOKB dan DAK Fisik</li> <li>- Sasaran Strategis : OPD</li> </ul>							

- Indikator Program/Keluaran : Terdukungnya Kegiatan DAK BOKB dan DAK (CPR)
- Manfaat : Terfasilitasinya dan Tersosialisasinya Program KKBPK
- Dampak : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr Praktek dan Bidan Praktek di anggarkan sebesar Rp. 175.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 170.771.359,- dengan persentase 97.58%. Dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

**Tabel 2.12**  
**Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi klinik KB, dr Praktek dan Bidan Praktek**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Sosialisasi/Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi klinik KB,dr Praktek dan Bidan Praktek	175.000.000,-	170,771.359,-	97.58	150orang	150orang	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Petugas</li> <li>- Sasaran Strategis : Klinik, Bidan dan Dokter</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Jumlah Petugas Klinik KB dan Faskes yang mengikuti sosialisasi/pelatihan</li> <li>- Manfaat : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Petugas</li> <li>- Dampak : Tercapainya sasaran program MKJP</li> </ul>							

## 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pelaksanaan Kegiatan Jambore PIK R/M dianggarkan sebesar Rp. 233.956.000,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 219.717.924,-,dengan persentase93,91. yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.13 sebagai berikut

**Tabel 2.13**  
**Kegiatan Jambore PIK Remaja / Mahasiswa**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jambore PIK Remaja / Mahasiswa	629.000.000,-	505.426.499,-	80,35	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja melalui wadah PIK Remaja tentang bahayanya TRIAD KRR
- Sasaran Strategis : Siswa SMP/SMA dan Mahasiswa dan Remaja yang belum menjadi Anggota PIK Remaja di Kabupaten Berau
- Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya kegiatan jamboree PIK di kabupaten Berau dan Memfasilitasi remaja agar memahami dan mempraktekkan pentingnya hidup sehat untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan GenRe ( Remaja Berencana )
- Indikator Kegiatan/Hasil : Terlaksananya Jambore PIK Remaja dan WorkShop
- Manfaat :
  1. Bertambahnya wawasan wawasan dan pengetahuan keterampilan dan kemampuan dalam mengelolah PIK di sekolah / di kampus.
  2. Menyebarkan informasi program KB dan pembangunan keluarga khususnya memberi konseling tentang Triad KRR tiga resiko yang di hadapi oleh remaja yaitu resiko yang berkaitan dengan seksual, Napza dan HIV AIDS kepada remaja / mahasiswa
  3. Wadah program GENRE yang di kelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja / mahasiswa serta kegiatan penunjang lainnya.
  4. Untuk menarik minat remaja untuk aktif berperan serta dalam PIK R/M.
- Dampak : Terbentuknya perilaku remaja yang sehat, berkualitas, cerdas dan ceria serta Mengurangi Kenakan remaja TRIAD KRR ( Pernikahan Dini, Sek Pranikah dan Napza )

## 6. Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi dianggarkan sebesar Rp. 2100.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 209.968.000,- dengan persentase 99,98% yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.21 sebagai berikut :

**Tabel 2.21**  
**Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	210.000.000,-	209.968.000,-	99,98	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Akses Layanan Keluarga Berencana</li> <li>- Sasaran Strategis : Pasangan Usia Subur (PUS)</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Terlayannya PUS menjadi Peserta KB</li> <li>- Manfaat : Meningkatnya kualitas keluarga Akseptor KB</li> <li>- Dampak : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</li> </ul>							

## 7. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 86.048.052,-dengan persentase 86,04% .. Ada kenaikan serapan anggaran di tahun 2018 di bandingkan tahun 2017 sebesar 85,98 %, dengan kenaikan serapan anggaran sebesar 0,06 %..yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.22 sebagai berikut :

**Tabel 2.22**  
**Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kel. UPPKS**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	100.000.000,-	86.048.052,-	86,04	5 Kelp1org..	5 Kelp.1 Org	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS</li> <li>- Sasaran Strategis : Anggota Kelompok UPPKS di 13 Kecamatan</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Meningkatnya Kelompok usaha pendapatan keluarga sejahtera</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Terbinanya 6 Kelompok UPPKS dan terbentuknya BPC AKU periode 2018-2022.</li> <li>- Manfaat : Terbinanya anggota kelompok UPPKS di bidang ekonomi.</li> <li>- Dampak : Meningkatnya pengetahuan bagi kelompok UPPKS</li> </ul>							

Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian, Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU dianggarkan sebesar Rp. 81.756.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 76.596.000,- dengan persentase 93,68% .. yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.23 sebagai berikut :

**Tabel 2.23**  
**Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kel. UPPKS**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PADU	81.756.000,-	76.596.000,-	93,68	13 Kel	15 el	113
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Para Kader BKB, BKR,BKL, Posyandu, PADU</li> <li>- Sasaran Strategis : Kader BKB, BKR, BKL, Pos Yandu dan PADU</li> <li>- Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR, BKL,</li> <li>- Indikator Kegiatan/Hasil : Terbinanya Para Kader BKB, BKR, BKL di 15 Kelompok .</li> </ul>							

- Manfaat : Memberikan Pemahaman dan Peningkatan Pengetahuan para Kader pada kelompok Tribina .
- Dampak Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan Tribina dalam rangka pembinaan pada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia sehingga dapat meningkatkan aktualita menuju Indonesia sehat..

#### E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan ( DPPA Tahun Anggaran 2018 ) yang dilaksanakan dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2018 ada yang tidak sesuai dengan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 2.24 sebagai berikut :

**Tabel 2.24**

#### **Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM RKPD	PROGRAM DPPA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5	Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak
6	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaran Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaran Gender dalam Pembangunan
7	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
9	Program Pelayanan Kontrasepsi	Program Pelayanan Kontrasepsi
10	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

#### F. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sarana dan prasarana gedung pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, ruangan sekretariat, ruangan kepala bidang Pengendalian Penduduk, ruangan Kepala Bidang KB, ruang Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , ruang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, ruang kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gabungan ruangan untuk semua kasi dan staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau. Selain itu juga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terdapat ruang rapat yang digunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan instansi terkait Kab. Berau.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.25 dibawah ini :

**Tabel 2.25**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan	Keterangan
1	Mobil	4 Unit	5 Unit	
2	Motor	27 Unit	35 Unit	
3	Laptop	21 Unit	24 Unit	
4	Komputer PC	13 Unit	26 Unit	
5	Printer	15 Unit	33 Unit	



## **G. Permasalahan dan Solusi**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan rata – rata serapan realisasi fisik sebesar 99,08 % . Jika di ukur dari skala penilaian maka realisasi Fisik pada skala nilai  $80 > 100$  kategori Penilaian Baik , dilihat dari capaian kinerja dari tahun 2017 dari realisasi sebesar 99 % ada kenaikan sebesar 0,08 % . Adapun realisasi belanja langsung dengan rata – rata serapan realisasi keuangan sebesar 79,46 %. Jika di ukur dari skala penilaian untuk realisasi keuangan pada Skala Nilai  $>55-80$  Kategori Penilaian Sedang. Untuk capaian realisasi keuangan tahun 2017 sebesar 76,40 % ada kenaikan penyerapan anggaran sebesar 3,06 %. Secara keseluruhan penilaian sudah di anggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Penyerapan Anggaran Keuangan kegiatan tidak mencapai 100 % di sebabkan Kegiatan Bantuan Operasional KB ( DAK – BOKB tahun 2018) hanya terrealisasi 50,10% atau Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB di karenakan ke terbatasan SDM di Kampung KB. Adapun permasalahan – permasalahan yang di hadapi dari semua kegiatan sebagaimana tersebut di bawah :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih adanya pembiayaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan anggaran yang ada dikarenakan kondisi yang tidak terduga.
- b. Masih kurang tertibnya pencatatan data persediaan barang dan aset
- c. Masih kurangnya staf yang memiliki standar pendidikan S1 dan memiliki keterampilan maksimal serta masih dibutuhkannya Tenaga Sopir.
- d. Masih kurangnya ruang kerja dimana masih menyatunya ruangan antara bidang – bidang.

Cara Pemecahan Masalah :/ Solusi

- a. Untuk memaksimalkan pembiayaan akan di lakukan pendataan kembali kebutuhan sehingga di hasilkan data akurat untuk perencanaan seluruh kebutuhan Dinas
- b. Akan di lakukan evaluasi kepada pengelola dan penyimpan barang.
- c. Memaksimalkan tenaga staf yang ada dan membuat usulan kepada Pemda untuk di berikan staf yang di butuhkan Dinas.
- d. Memaksimalkan ruangan yang ada dan akan melakukan penyekatan ruangan membuat usulan minta kantor baru kepada Pemda Kabupaten Berau.

## **2. Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih kurangnya fasilitas Parkir yang memadai untuk kendaraan roda 2 dan 4 bagi karyawan dan karyawan.
- b. Masih Kurangnya ruangan kerja untuk kebutuhan dari 5 Bidang dan 1 Sekretariatan
- c. Masih kurangnya sarana Kendaraan roda dua untuk keperluan operasional pejabat eselon III dan IV

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Akan melakukan koordinasi dengan tim panggar mengenai pembuatan tambahan parkir kendaraan roda 2 dan 4 yang memadai..
- b. Akan di lakukan pengusulan kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan Gedung Kantor yang baru untuk memenuhi kebutuhan dari DPPKBP3A Kabupaten Berau
- c. Membuat usulan anggaran setiap tahun pengadaan kendaraan roda dua untuk keperluan pejabat eselon III dan IV

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

- a, Masih kurangnya Tenaga – Tenaga Teknis Keuangan,, Perencanaan dan Teknis Lainnya yang sesuai dengan Bidang Tugasnya.
- b. Masih ada ASN yang belum faham dengan teknologi modern
- c. Masih kurang fahamnya ASN dalam pembuatan laporan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan serta masih kurangnya pemahaman dengan tugas dan fungsinya.

Cara Pemecahan Masalah :

- a. Akan di lakukan peningkatan SDA dengan mengikuti Diklat atau pelatihan pelatihan teknis baik yang di adakan di tingkat daedrah, Provinsi ataupun Tingkat Pusat.
- b. Melakukan Pembinaan terhadap ASN melalui rapat = rapat koordinasi antara bidang – bidang .
- c. Melakukan Himbauan – himbauan dan bimbingan langsung dari kasi, Kasubag, atau Kepala Bidang.

#### **4. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih kurangnya perhatian dari bidang – bidang untuk menyampaikan data – data hasil kegiatan yang telah di laksanakan setiap tahun
- b. Kurangnya pemahaman dari SDA sehingga adanya kesulitan dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.

Cara Pemecahan Masalah :

- a. Akan melakukan koordinasi yang kontinyu kepada bidang – bidang dengan harapan adanya perhatian yang lebih khusus atas laporan kegiatan yang telah di laksanakan.
- b. Membuatkan Form – form laporan untuk mempermudah penyampaian laporan dari semua kegiatan yang di laksanakan.
- c. Akan di lakukan peningkatan SDA dengan mengikuti pelatihan dan diklat yang sesuai dengan kebutuhan dari seluruh ASN

## **5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak**

### **Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan:**

Permasalahan Yang di hadapi :

- a. OPD yang menjadi sasaran kerja belum maksimal dalam mengikuti pelatihan dan sosialisas tentang pentingnya PUG melalui PPRG.
- b. Belum maksimalnya POKJA PUG Kabupaten
- c. Belum di bentuknya Pokal Poin di semua OPD
- d. Belum di bentuknya Driver pada instansi terkait ( Baplitbang, Inspektorat, BKAD dan DPPKBP3A )
- e. Belum semua OPG melaksanakan PUG dalam PPRG.

Cara Pemecahan Masalah/ Solusi :

- a. DP2KBP3A akan melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada OPD – OPD yang sudah mengikuti pelatihan dan sosialisasi.
- b. Melakukan koordinasi melalui rapat anggota POKJA PUG Kabupaten
- c. Akan Membentuknya Pokal Poin di semua OPD
- d. Akan di bentuk driver di instansi tertkait
- e. Mewajibkan yang menjadi Pokal Poin adalah Kasubag Penyusunan Program dari seluruh OPD

### **Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A**

Permasalahan Yang di hadapi :

- a. Meningkatnya Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun sebelumnya (tahun 2017 sebanyak 57 Kasus tahun 2018 Meningkat menjadi 74 Kasus)

Cara Pemecahan Masalah :

- a. Melakukan gerakan pencegahan kekerasan melalui pelatihan Aktivitas PATBM di 30 Kelurahan dan Kampung

- b. Penambahan Tenaga Psikolog dan tenaga Peksos melalui APBD tahun 2019.
- c. Mengutamakan peningkatan kapasitas SDM/ Tenaga lainnya melalui pelatihan dll.

**Kegiatan** Kabupaten Layak Anak (KLA)

Permasalahan yang di hadapi :

- a. Gugus tugas belum berfungsi sehingga pencapaian indicator belum maksimal

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Adanya pertemuan gugus tugas setiap triwulan dan per kluster

**Kegiatan** Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak dalam Pembangunan

Permasalahan yang di hadapi

- a. Forum anak belum berfungsi sebagai pelapor dan pelopor.

Cara Pemecahan Masalah/Solusi

- a. Perlu pelatihan pelopor dan pelapor untuk forum anak.

**Kegiatan** Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Puspaga Berbasis Hak Anak

Permasalahan Yang di hadapi :

- a. Masih minimnya pengetahuan masyarakat, orang tua tentang pola pengasuhan anak.
- b. Tenaga konselor PUSPAGA juga merangkap sebagai tenaga di P2TP2A

Cara Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pola Asuh Anak..
- b. Perlu perekrutan tenaga penanganan kasus di P2TP2A dan mengembalikan fungsi konselor di PUSPAGA

## **6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan**

### **Kegiatan** Pembinaan Organisasi Perempuan

Permasalahan yang dihadapi :

- a. Kegiatan Monev, kesepakatan jadwal waktu kunjungan ke organisasi dan petugas / team yang belum akurat
- b. Kegiatan pertemuan monev di Kabupaten belum dapat dilaksanakan oleh karena keterbatasan waktu dan tenaga pelaksana.
- c. Beberapa organisasi yang belum memiliki dan memperpanjang SKT
- d. Masih banyak organisasi yang belum memiliki Sekretariat dan perlengkapan organisasi
- e. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan organisasi masih kurang maksimal
- f. Keterbatasan dana organisasi sehingga menghambat kelancaran kegiatan organisasi

Cara Pemecahan Masalah / Solusi :

- a. Koordinasi dan konfirmasi jadwal yang tepat kepada OPD terkait dan Organisasi perempuan.
- b. Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan lebih awal
- c. Menyampaikan surat edaran perpanjangan SKT/Menfasilitasi pengurusan SKT
- d. Koordinasi dengan pengurus untuk di buat sekretariat sementara dan melengkapi fasilitas organisasi
- e. Kurangnya Mengingatkan kembali kepada organisasi untuk membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan melalui program pembinaan organisasi.
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta sebagai bentuk dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **Kegiatan** Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan

Permasalahan yang di hadapi :

- a. dana pendukung untuk melakukan kegiatan expose peningkatan kualitas perempuan dalam pembangunan.

Cara Pemecahan Masalah :

- a. Penambahan anggaran kegiatan

## **7. Program Keluarga Berencana**

### **Kegiatan** Pendistribusian Alat Kontrasepsi (ALOKON)

Permasalahan yang dihadapi yaitu

- a. 2 Faskes tidak dilakukannya dropping Alokon di karenakan tidak adanya Akseptor KB
- b. Geografi wilayah yang saling berjauhan untuk di jangkau dalam pendistribusian Alokont.
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai
- d. Tenaga Staf yang masih merangkap kerja dengan bidang lain
- e. Polindes / Pukesmas pembantu dengan UPTD Puskesmas yang berjauhan dalam pengamprahan Alokont masih sulit
- f. Tersedianya dana yang masih terbatas

Cara Pemecahan Masalah / Solusi :

- a. Dikarenakan Kondisi Geografis masing – masing Faskes / Klinik KB yang berjauhan yang berdampak pada biaya atau anggaran maka solusi yang di lakukan adalah dengan melakukan subsidi silang dengan program kerja BKKBN Provinsi dan Pusat.
- b. Dengan cara membuat usulan program kegiatan yang akurat kepada Pemerintah Daerah dan Pemda dapat mendukung dengan anggaran yang cukup dan akurat.

### **Kegiatan** Penyediaan Sarana dan Prasaran Penyuluh KB

Permasalahan Yang di hadapi :

- a, Belum tersedianya tanah yang legal untuk pengadakan sapras KB di 7 kecamatan.

- b. Pemerintah Daerah tidak menyediakan tanah yang bersertifikat untuk membangun Balai Penyuluh KB, Tanah yang tersedia di kel. Sambaliung sehingga pembangunan BPKB di Kelurahan Sambaliung.

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. DPPKBP3A Melalui Bidang Dalduk akan membuat pemetaan dan perencanaan dan usulan untuk pengadaan tanah melalui Dinas pertanahan

#### **Kegiatan Bantuan Biaya Operasional KB (DAK – BOKB 2018)**

Permasalahan yang di hadapi :

- a. Tidak terserapnya dana operasional Balai Penyulu KB yang di anggarkan untuk 7 Balai di karenakan balai yang yang dibangun tahun 2018 baru 1 ( satu ) unit
- b. Tidak tersedianya dana Pendamping DAK – BOKB dari APBD sehingga tidak tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung biaya operasional penyuluhan KB di Kampung KB
- c. Pokja Kampung Kb tidak dapat melaksanakan kegiatan kampung KB di karenakan minimnya pengetahuan dari SDM Pokja di Kampung KB.
- d. Banyaknya kegiatan di Kampung kampung terpencil dan pulau pulau terluar yang sulit terjangkau sehingga dana kegiatan pertemuan di kampung – kampung tersebut tidak dapat di gunakan.
- e. PKB yang ada kurang pro aktif dalam melaksanakan program kerja KKBPK
- f. Masih terbatasnya petugas PKB di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah kampong dan sangat luasnya antara kampong yang di layani.

Cara Pemecahan Masalah / Solusi :



- a. Tahun 2019 akan dibuat perencanaan anggaran yang lebih akurat dengan cara berkoordinasi dengan camat untuk menyediakan 1 ruangan khusus untuk fasilitasi bagi PKB di masing – masing kecamatan sehingga dapat menyerap biaya operasional balai penyuluh
- b. Berkoordinasi kepada Camat terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Balai Penyulu KB di 7 Kecamatan
- c. Akan di rencanakan pengusulan dana pendampingan DAK BOKB tahun 2019.
- d. Akan melakukan penguatan atau pelatihan secara berjenjang kepada POKJA kampung KB melalui pembiayaan Danapendampingan DAK – BOKB
- e. Dilakukannya penunjukan PKB sebagai pengampu (Pembina Kampung KB) dengan meklalui Surat Penunjukan SK Kepala DPPKBP3A
- f. Melakukan usulan kepada BKKBN Perwakilan Provinsi untuk penambahan tenaga PLKB.

## 8. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Permasalahan yang di hadapi

**Kegiatan** Jambore PIK Remaja / Mahasiswa:

Permasalahan Yang di hadapi :

- a. Masih kurangnya pengetahuan remaja yang tidak bergabung dalam PIK seputar GenRe
- b. Sekretariat PIK yang belum terfasilitasi di sekolah
- c. Guru BK yang belum memiliki data kenakalan remaja di sekolah
- d. Guru BK yang kurang memahami GenRe dan PIK (Pusat Informasi Konseling)
- e. Forum PIK R yang tidak sepopuler kegiatan extra kulikuler lain, terutama sekolah yang jauh dari kota
- f. Kenakan remaja yang menjadi trend di kalangan remaja terutama di daerah perkampungan

- g. Pemakaian Napza dapat mempengaruhi kesehatan remaja dan perempuan yang akan mengalami kehamilan serta merusak generasi muda bangsa.

Cara Pemecahan Masalah / Solusi :

- a. Mengkampanyekan / Sosialisasi ke sekolah – sekolah dan lingkungan masyarakat tentang program GenRe
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar memprioritaskan dan memfasilitasi sekretaris PIK di sekolah
- c. Memahami pentingnya record kasus kenakalan yang terjadi di sekolah sebagai bahan evaluasi dan monitoring pihak sekolah khususnya guru BK
- d. Kampanye GenRe tidak sebatas pada siswa/I saja tapi juga kepada Pembina yaitu guru BK
- e. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi daya Tarik siswa/I terhadap PIK Remaja.

## 9. Program Pelayanan Kontrasepsi

Permasalahan yang di hadapi :

**Kegiatan** Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB:

- a. Kondisi Wilayah yang jauh dan sulit di jangkau dan jauh dari FASKES
- b. Sarana dan Prasarana serta dana yang terbatas
- c. Petugas Lapangan KB sebagai motivator KB sangat terbatas di banding kampung dank el. Yang ada
- d. Belum semua Bidan di Faskes mendapatkan pelatihan keterampilan dalam pemasangan KB MKJP

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Di perlukan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) atau mobil antar jemput Akseptor sehingga PUS yang membutuhkan pelayanan KB dapat di layani dengan cara jemput bola
- b. Pembinaan dan penyuluhan KB masih perlu di tingkatkan
- c. Perlu penambahan PLKB sesuai dengan luas wilayah minimal 2 (dua) orang untuk 1(satu) Kampung PLKB

## **10. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

### **Kegiatan** Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS

Permasalahan yang di hadapi :

- a. Belum tersedianya bantuan modal untuk 39 kelompok UPPKS.
- b. Belum tersedianya bantuan peralatan untuk 39 kelompok UPPKS
- c. Belum tersedianya bantuan pembuatan label halal untuk 39 kelompok UPPKS
- d. Belum adanya bantuan P-IRT bagi kelompok yang belum mendapatkan izin edar.

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Perlu adanya dukungan pemerintah daerah untuk dukungan pembelajaran bagi tenaga pembimbing dan anggota kelompok UPPKS
- b. Perencanaan usulan dana bantuan untuk modal dan peralatan bagi kelompok UPPKS
- c. Membantu pengurusan Label Halal dan P-IRT untuk kelompok yang belum memiliki label dan izin.

### **Kegiatan** Pengkajian Model Operasional BKB – Posyandu - Padu

Permasalahan yang di hadapi :

- a. BKB yang dibentuk 82 Kelompok tahun 2018 yang di bina sebanyak 13 Kelompok, BKR 13 Kelompok yang dibina tidak ada, BKL 13 Kelompok yang dibina 2 kelompok, dari semua kelompok yang dibentuk sebanyak 108 Kel yang dapat dibina pada tahun 2018 hanya 15 kelompok saja. Dikarenakan terbatasnya anggaran dan juga kegiatan merupakan kegiatan tambahan di anggaran perubahan sehingga dari segi dana dan waktu tidak memungkinkan untuk melakukan pembinaan pada semua kelompok.
- b. Belum tersedianya data tumbuh kembang anak (KKA)
- c. 3. Masih kurangnya prasarana R/R ( register pencatatan dan pelaporan ) dan BKB blangko KKA ( Kartu kembang anak)

- d. Kurangnya keterampilan kader BKB dalam hal penyuluhan.
- e. Kurangnya pembinaan dari petugas lapangan PKB.

Cara Pemecahan Masalah / Solusi

- a. Mengingat dana yang minim maka diambil kebijakan dengan melakukan perencanaan penganggaran dengan teknik bergantian dan terstruktur.
- b. Dilakukannya pendataan dengan pengisian register C/1 dan R/1 yang diisi oleh kader BKB
- c. Akan di laksanakan permohonan kepada BKKBN perwakilan Provinsi Kalimantan Timur katu KKA yang akan di bagikan ke masing – masing kelompok melalui kader BKB
- d. Dilakukan pembinaan / pelatihan oleh petugas lapangan (PKB)
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan.